



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 19 November 2019

Waktu : 10.00 WITA

Perihal : Rapat Bapemperda terkait Ranperda Tahap III Tahun 2019

Pimpinan Rapat : Ketua Bapemperda (Drs.H.M. Sarkawi A.Hamid, M.Si)

Peserta Rapat : (Daftar Hadir Terlampir)

I. Pendahuluan :

1. Rapat dibuka oleh Ketua Bapemperda (Drs.H.M. Sarkawi A.Hamid, M.Si)
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat dan meminta Pihak Pemrakarsa Perda menjelaskan Urgensi Pembentukan Perda

II. Jalannya Rapat :

➤ Kabag. Organisasi dan PA :

Mengenai penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pelaksanaan pengkajian dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penataan kelembagaan diperoleh informasi dalam melakukan penataan ulang kelembagaan yang ada pada saat ini, antara lain pada.

1. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Baru

Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap urusan keuangan (Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah) maka dimungkinkan membentuk dua perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah serta lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah memungkinkan untuk dibentuk Badan Pendapatan Daerah.

2. Penataan beberapa Organisasi Daerah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi perangkat daerah:

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan menjadi Dinas Perikanan
2. Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3. Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menjadi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
5. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

3. Peningkatan Tipe Organisasi Perangkat Daerah :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe A.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C Menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B.
4. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka dilakukan penguatan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditingkatkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 4 Bidang.

➤ H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si :

Diralat suratnya, tidak ada anggaran untuk dinas yang akan dilebur ini. Bagaimana dengan dinas baru ?

- BPKD :
Rencana pemekaran BPKD ke Bapenda tidak merencanakan RKA tidak ada kordinasi antara Organisasi.
- Dinas Pertanian:
Di Permentan No. 43 Tahun 2016 sudah jelas struktur kelembagaannya. Perpindahan Bidang Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian sehingga menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si :
Persoalan anggaran di perpindahan bidang ini bagaimana? Koordinasi antara SKPD sudah ada walaupun belum secara intensif. Bagaimana dengan Perda Retribusi Pasar.
- BPKD:
Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan perubahan karena:
 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 2. Hasil Rekomendasi Inspektorat Provinsi harus mengubah tarif retribusi pasar
 3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan Indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si :
Kita kaji lebih lanjut, semoga ada efektifitas pendapatan. Ini menjadi kebutuhan yang penting
- Tugiat, S.Ag :
Sudah waktunya dilakukan Perubahan dan didorong untuk membentuk pansus dan dibahas lebih lanjut di Bapemperda.
- Kadis Pendidikan:
Perpindahan Bidang nantinya jangan sampai tidak bisa berbuat apa apa karena persoalan anggaran.

Kesimpulan:

1. Pihak Bagian Organisasi dan PA Setda memperbaiki surat yang masuk ke DPRD, per tanggal 22 Oktober dengan nomor: 188.342/0359/Bup, karena tidak sesuai dengan Perda yang menjadi lampirannya.
2. Mengenai perubahan OPD, sesegara mungkin membahas bersama TAPD membicarakan perisapan anggaran.
3. Mengenai Ranperda tentang Perangkat Daerah, Bapemperda akan melakukan konsultasi ke Biro Organisasi Tata Laksana Prov. Sulsel sebagai tahapan awal sebelum ranperda ini sebelum diserahkan ke DPRD.

Ketua Bapemperda



Drs. H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si

Notulen: Hadriana Hatta, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
MALILI, 92982

DAFTAR HADIR BAPEMPERDA

Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2019
Waktu : 10.00 WITA s/d selesai
Agenda : Rapat Kerja mengenai Ranperda Tahap III Tahun 2019

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. M. SARKAWI A. HAMID, M.Si			Ketua	
2	ALPIAN, A.Ma.Pd			Wakil Ketua	
3	BADAWI ALWI, SE			Anggota	
4	SUNAWAR ARISAL, S.Sos			Anggota	
5	MAHADING, S.Sos			Anggota	
6	TUGIAT, S.Ag			Anggota	
7	IRMANTO HAFID, S.An			Anggota	
8	MASRUL SUARA			Anggota	
9	OBER DATTE			Anggota	
10	Guntur Hafid			Ker. Kesbangpol	
11	A.R. SALIM			Kerang Dykpa	
12	CA PESSIE			Kasus Dk	
13	Amrullah	L		Sebidia	
14	KHAMPUK	L		Kerang. Kelentangan	

[illegible]